

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1. Latar Belakang	I-1
I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-1
I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	I-2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	II-1
BAB III RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	III-1
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	IV-1
IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Per SKPD	IV-1
IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD	IV-6
IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-8
IV.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal Dan Belanja Tidak Terduga	IV-1
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam Rancangan Perubahah PPAS APBD Kota Batam Tahun 2022 memuat antara lain:

- a) Perubahan Pendapatan Daerah
- b) Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Sedangkan sistematika Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
- Bab III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah
- Bab IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- Bab V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
- Bab VI. Penutup

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar proses penyusunan Perubahan APBD Kota

Batam Tahun 2022 dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
 35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 123);
 37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Target Perubahan Pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2022 sebesar Rp. **3.060.578.185.636** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.602.052.879.903	1.537.749.298.346	(64.303.581.557)
4.1.01	Pajak Daerah	1.290.683.000.000	1.265.283.417.479	(25.399.582.521)
4.1.02	Retribusi Daerah	184.749.105.918	148.889.198.197	(35.859.907.721)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.648.420.047	10.376.332.794	(2.272.087.253)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	113.972.353.938	113.200.349.876	(772.004.062)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.515.739.507.600	1.508.918.077.719	(6.821.429.881)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.249.101.377.000	1.242.279.947.119	(6.821.429.881)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	266.638.130.600	266.638.130.600	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.000.000.000	13.910.809.571	(2.089.190.429)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000.000	13.910.809.571	(2.089.190.429)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.133.792.387.503	3.060.578.185.636	(73.214.201.867)

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran 2022 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kota Batam;
2. Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas dan Bermartabat;
3. Reformasi Birokrasi;
4. Peningkatan Investasi dan Pariwisata; dan
5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

BAB IV
**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN,
 PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Per SKPD

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per Urusan Per SKPD berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, bidang urusan dan satuan kerja perangkat daerah sebagai berikut :

TABEL 4.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER URUSAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

No	URUSAN/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.872.737.938.538	1.929.838.697.726	57.100.759.188	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	861.991.386.749	886.193.051.269	24.201.664.520	
	DINAS PENDIDIKAN	861.991.386.749	886.193.051.269	24.201.664.520	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	368.941.454.978	448.960.278.094	80.018.823.116	
	DINAS KESEHATAN	228.458.195.761	248.261.184.947	19.802.989.186	
	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	140.483.259.217	200.699.093.147	60.215.833.930	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	450.798.904.128	415.859.890.302	(34.939.013.826)	
	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	218.845.632.477	200.396.778.465	(18.448.854.012)	
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	231.953.271.651	215.463.111.837	(16.490.159.814)	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	-	-	-	

4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117.176.921.139	104.014.439.751	(13.162.481.388)	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	117.176.921.139	104.014.439.751	(13.162.481.388)	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	56.866.122.516	58.581.348.580	1.715.226.064	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.667.534.170	10.739.404.521	1.071.870.351	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.198.588.346	47.841.944.059	643.355.713	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.963.149.028	16.229.689.730	(733.459.298)	
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.963.149.028	16.229.689.730	(733.459.298)	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	451.434.521.878	419.988.979.758	(31.445.542.120)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	26.844.187.069	22.662.214.089	(4.181.972.980)	
	DINAS TENAGA KERJA	26.844.187.069	22.662.214.089	(4.181.972.980)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.364.149.693	14.252.937.608	1.888.787.915	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.364.149.693	14.252.937.608	1.888.787.915	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.858.197.772	10.825.835.781	(32.361.991)	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.858.197.772	10.825.835.781	(32.361.991)	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9.465.295.587	7.702.021.255	(1.763.274.332)	
	DINAS PERTANAHAN	9.465.295.587	7.702.021.255	(1.763.274.332)	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	137.380.373.988	126.113.511.836	(11.266.862.152)	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	26.625.152.062	15.435.088.494	(11.190.063.568)	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88.088.584.483	87.510.344.937	(578.239.546)	
	KECAMATAN BENGKONG	3.333.697.380	3.540.342.883	206.645.503	
	KECAMATAN NONGSA	1.901.705.566	1.901.705.566	-	
	KECAMATAN BATU AJI	3.649.657.991	3.521.355.271	(128.302.720)	
	KECAMATAN SEKUPANG	3.214.348.400	3.214.348.400	-	
	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	1.586.846.256	1.608.463.656	21.617.400	

	KECAMATAN BATAM KOTA	2.296.498.468	2.259.518.397	(36.980.071)	
	KECAMATAN BELAKANG PADANG	940.106.569	1.378.567.419	438.460.850	
	KECAMATAN SAGULUNG	3.196.611.058	3.196.611.058	-	
	KECAMATAN BATU AMPAR	1.295.667.360	1.295.667.360	-	
	KECAMATAN LUBUK BAJA	1.251.498.395	1.251.498.395	-	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.691.955.505	16.786.190.588	1.094.235.083	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.691.955.505	16.786.190.588	1.094.235.083	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.772.458.770	15.547.402.770	(225.056.000)	
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.772.458.770	15.547.402.770	(225.056.000)	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.896.448.000	9.799.709.150	(96.738.850)	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.896.448.000	9.799.709.150	(96.738.850)	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100.839.813.262	85.108.366.990	(15.731.446.272)	
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	47.137.135.200	30.370.398.450	(16.766.736.750)	
	DINAS PERHUBUNGAN	53.702.678.062	54.737.968.540	1.035.290.478	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.590.805.864	19.433.941.664	(1.156.864.200)	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.590.805.864	19.433.941.664	(1.156.864.200)	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.054.323.119	10.792.074.444	(2.262.248.675)	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	13.054.323.119	10.792.074.444	(2.262.248.675)	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.830.448.903	13.326.055.020	(2.504.393.883)	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.830.448.903	13.326.055.020	(2.504.393.883)	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.108.171.422	56.372.354.730	6.264.183.308	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.108.171.422	56.372.354.730	6.264.183.308	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	26.951.000	26.951.000	-	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.951.000	26.951.000	-	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	101.241.300	92.161.200	(9.080.100)	

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	101.241.300	92.161.200	(9.080.100)	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.797.573.960	3.157.475.960	(640.098.000)	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.797.573.960	3.157.475.960	(640.098.000)	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.391.252.164	7.693.598.173	(697.653.991)	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.391.252.164	7.693.598.173	(697.653.991)	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	420.874.500	296.177.500	(124.697.000)	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	420.874.500	296.177.500	(124.697.000)	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	55.235.326.621	54.487.512.755	(747.813.866)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.980.953.909	12.908.604.724	(72.349.185)	
	DINAS PERIKANAN	12.980.953.909	12.908.604.724	(72.349.185)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.972.117.746	13.725.877.493	(1.246.240.253)	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	14.972.117.746	13.725.877.493	(1.246.240.253)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.480.802.322	4.477.939.622	(2.862.700)	
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.480.802.322	4.477.939.622	(2.862.700)	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.407.619.260	5.040.993.650	(1.366.625.610)	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.407.619.260	5.040.993.650	(1.366.625.610)	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	16.393.833.384	18.334.097.266	1.940.263.882	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	16.393.833.384	18.334.097.266	1.940.263.882	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	332.981.696.037	331.310.149.132	(1.671.546.905)	
1	SEKRETARIAT DAERAH	212.261.670.952	198.408.260.119	(13.853.410.833)	
	SEKRETARIAT DAERAH	212.261.670.952	198.408.260.119	(13.853.410.833)	
2	SEKRETARIAT DPRD	120.720.025.085	132.901.889.013	12.181.863.928	
	SEKRETARIAT DPRD	120.720.025.085	132.901.889.013	12.181.863.928	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	138.826.827.085	116.517.937.644	(22.308.889.441)	
1	PERENCANAAN	13.158.146.710	13.512.260.424	354.113.714	
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.158.146.710	13.512.260.424	354.113.714	
2	KEUANGAN	106.698.783.340	84.625.844.185	(22.072.939.155)	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	69.690.950.757	48.220.120.839	(21.470.829.918)	
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37.007.832.583	36.405.723.346	(602.109.237)	
3	KEPEGAWAIAN	13.752.806.235	13.668.384.235	(84.422.000)	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	13.752.806.235	13.668.384.235	(84.422.000)	

	DAYA MANUSIA				
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.126.306.300	4.628.132.300	(498.174.000)	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.126.306.300	4.628.132.300	(498.174.000)	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	90.784.500	83.316.500	(7.468.000)	
	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	90.784.500	83.316.500	(7.468.000)	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.001.463.641	25.598.186.704	596.723.063	
1	INSPEKTORAT DAERAH	25.001.463.641	25.598.186.704	596.723.063	
	INSPEKTORAT DAERAH	25.001.463.641	25.598.186.704	596.723.063	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	325.797.974.399	321.441.634.253	(4.356.340.146)	
1	KECAMATAN	325.797.974.399	321.441.634.253	(4.356.340.146)	
	KECAMATAN BENGKONG	23.563.435.691	22.765.436.982	(797.998.709)	
	KECAMATAN NONGSA	21.592.130.527	21.862.930.506	270.799.979	
	KECAMATAN BATU AJI	25.653.326.836	24.488.322.496	(1.165.004.340)	
	KECAMATAN GALANG	36.223.579.266	36.619.607.145	396.027.879	
	KECAMATAN SEKUPANG	35.271.989.953	35.383.037.761	111.047.808	
	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	21.087.052.863	20.907.323.160	(179.729.703)	
	KECAMATAN BATAM KOTA	31.338.553.072	31.227.185.607	(111.367.465)	
	KECAMATAN BULANG	25.647.457.358	26.675.233.876	1.027.776.518	
	KECAMATAN BELAKANG PADANG	25.977.661.187	26.940.514.741	962.853.554	
	KECAMATAN SAGULUNG	33.176.146.603	32.048.893.502	(1.127.253.101)	
	KECAMATAN BATU AMPAR	19.893.409.342	17.603.140.964	(2.290.268.378)	
	KECAMATAN LUBUK BAJA	26.373.231.701	24.920.007.513	(1.453.224.188)	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.473.462.384	16.545.423.404	71.961.020	
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.473.462.384	16.545.423.404	71.961.020	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.473.462.384	16.545.423.404	71.961.020	
	TOTAL	3.218.489.210.583	3.215.728.521.376	(2.760.689.207)	

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD berisikan plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai berikut:

TABEL 4.2
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2022

No	SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1	DINAS PENDIDIKAN	861.991.386.749	886.193.051.269	24.201.664.520	
2	DINAS KESEHATAN	228.458.195.761	248.261.184.947	19.802.989.186	
3	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH	140.483.259.217	200.699.093.147	60.215.833.930	
4	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	218.845.632.477	200.396.778.465	(18.448.854.012)	
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	279.090.406.851	245.833.510.287	(33.256.896.564)	
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	143.802.073.201	119.449.528.245	(24.352.544.956)	
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.667.534.170	10.739.404.521	1.071.870.351	
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.198.588.346	47.841.944.059	643.355.713	
9	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.735.607.798	31.777.092.500	(958.515.298)	
10	DINAS TENAGA KERJA	26.844.187.069	22.662.214.089	(4.181.972.980)	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.260.597.693	24.052.646.758	1.792.049.065	
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15.339.000.094	15.303.775.403	(35.224.691)	
13	DINAS PERTANAHAN	9.465.295.587	7.702.021.255	(1.763.274.332)	
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88.088.584.483	87.510.344.937	(578.239.546)	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.691.955.505	16.786.190.588	1.094.235.083	
16	DINAS PERHUBUNGAN	53.702.678.062	54.737.968.540	1.035.290.478	
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.718.998.164	19.553.053.864	(1.165.944.300)	

18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	13.054.323.119	10.792.074.444	(2.262.248.675)	
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.830.448.903	13.326.055.020	(2.504.393.883)	
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	50.108.171.422	56.372.354.730	6.264.183.308	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.812.126.664	7.989.775.673	(822.350.991)	
22	DINAS PERIKANAN	12.980.953.909	12.908.604.724	(72.349.185)	
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18.769.691.706	16.883.353.453	(1.886.338.253)	
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.801.452.644	23.375.090.916	573.638.272	
25	SEKRETARIAT DAERAH	212.261.670.952	198.408.260.119	(13.853.410.833)	
26	SEKRETARIAT DPRD	120.720.025.085	132.901.889.013	12.181.863.928	
27	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.248.931.210	13.595.576.924	346.645.714	
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	69.690.950.757	48.220.120.839	(21.470.829.918)	
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37.007.832.583	36.405.723.346	(602.109.237)	
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.879.112.535	18.296.516.535	(582.596.000)	
31	INSPEKTORAT DAERAH	25.001.463.641	25.598.186.704	596.723.063	
32	KECAMATAN BENGKONG	26.897.133.071	26.305.779.865	(591.353.206)	
33	KECAMATAN NONGSA	23.493.836.093	23.764.636.072	270.799.979	
34	KECAMATAN BATU AJI	29.302.984.827	28.009.677.767	(1.293.307.060)	
35	KECAMATAN GALANG	36.223.579.266	36.619.607.145	396.027.879	
36	KECAMATAN SEKUPANG	38.486.338.353	38.597.386.161	111.047.808	
37	KECAMATAN SUNGAI BEDUK	22.673.899.119	22.515.786.816	(158.112.303)	
38	KECAMATAN BATAM KOTA	33.635.051.540	33.486.704.004	(148.347.536)	
39	KECAMATAN BULANG	25.647.457.358	26.675.233.876	1.027.776.518	
40	KECAMATAN BELAKANG PADANG	26.917.767.756	28.319.082.160	1.401.314.404	
41	KECAMATAN SAGULUNG	36.372.757.661	35.245.504.560	(1.127.253.101)	
42	KECAMATAN BATU AMPAR	21.189.076.702	18.898.808.324	(2.290.268.378)	
43	KECAMATAN LUBUK BAJA	27.624.730.096	26.171.505.908	(1.453.224.188)	
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.473.462.384	16.545.423.404	71.961.020	
TOTAL		3.218.489.210.583	3.215.728.521.376	(2.760.689.207)	

IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan dalam tabel 4.3 di bawah ini.

IV.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal Dan Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara ini berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dituangkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Perubahan			
		Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1	Belanja Pegawai	1.169.607.007.490	1.190.090.641.556	20.483.634.066	0,02
2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.854.124.413	1.155.657.712.892	119.803.588.479	0,12
3	Belanja Hibah	147.705.533.602	141.341.720.768	(6.363.812.834)	(0,04)
4	Belanja Bantuan Sosial	21.180.055	21.180.055	-	-
5	BELANJA MODAL	825.326.401.025	711.126.166.979	(114.200.234.046)	(0,14)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.177.238.137	95.349.876.675	7.172.638.538	0,08
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.497.367.390	175.235.514.952	(46.261.852.438)	(0,21)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	456.727.825.698	422.639.763.768	(34.088.061.930)	(0,07)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.923.969.800	17.901.011.584	(41.022.958.216)	(0,70)
6	Belanja Tidak Terduga	39.974.963.998	17.491.099.126	(22.483.864.872)	(0,56)
	TOTAL	3.218.489.210.583	3.215.728.521.376	(2.760.689.207)	

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.600	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	
	Pembiayaan Netto	84.696.823.080	155.150.335.740	70.453.512.660	

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022.